

2020

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)



DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

LKPJ BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat

Penyelenggarakan urusan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat didukung oleh Program dan Kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan urusan Dinas Perkebunan kabupaten Pasaman Barat dari Dana APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan penyediaan pelayanan administrasi perkantoran adalah kegiatan yang sifatnya melakukan pelayanan terhadap Pegawai yang ada pada Dinas perkebunan Kabupaten Pasaman Barat, disamping pelayanan publik yang tujuan utamanya adalah untuk terlaksananya kinerja dinas. Uraian kegiatan ini diantaranya adalah Belanja Pegawai, belanja ATK, belanja spanduk, belanja materai, belanja telephone, belanja air, belanja listrik, belanja jasa pariwara, belanja jasa tenaga lepas, belanja cetak, belanja penggandaan/fotocopy, belanja makanan dan minuman rapat dan belanja makanan dan minuman lembur.

- a. Pagu Dana Rp. 589.146.500,- Realisasi Keuangan Rp. 553.737.650,- (93,99%)
Realisasi Fisik (100%).

b. Permasalahan

- Pengurangan anggaran karena kebijakan recfocusing pada APBD 2020 menyebabkan sebagian belanja tidak dapat dibayarkan seperti honorarium PPTK, honorarium pejabat penandatangan SPM dan honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa.
- Adanya silpa pada kegiatan penyediaan administrasi perkantoran seperti belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja uang makan dan minum

harian non PNS, belanja tenaga harian lepas dan belanja makan minum rapat sebesar Rp. 35.408.850,-.

c. Pemecahan Masalah

- Adanya penambahan dana pada belanja kegiatan khususnya pada kegiatan belanja rutin bulanan seperti honorarium PPTK, honorarium pejabat penandatangan SPM dan honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa.
- Silpa anggaran kegiatan disebabkan oleh :
 1. Belanja telepon tidak terealisasi sebesar Rp. 6.000.000,- disebabkan jaringan telepon kantor tidak dipakai selama tahun 2020. Sehingga untuk tahun 2021 anggaran belanja telepon akan dihilangkan jika jaringan telepon tidak digunakan.
 2. Belanja air tidak terealisasi sebesar Rp. 7.178.100,- disebabkan penganggaran yang cukup besar sehingga untuk tahun 2021 belanja air akan dilakukan efisiensi.
 3. Belanja uang makan dan minum harian non PNS tidak terealisasi sebesar Rp. 5.075.000,- akan dilakukan efisiensi anggaran untuk tahun 2021.
 4. Belanja listrik tidak terealisasi sebesar Rp. 10.389.000,- disebabkan penganggaran yang cukup besar sehingga untuk tahun 2021 belanja listrik akan dilakukan efisiensi.
 5. Belanja tenaga harian lepas tidak terealisasi sebesar Rp. 2.550.000,- disebabkan 3 (tiga) tenaga harian lepas tahun 2020 memiliki masa kerja hanya 11 bulan.
 6. Belanja makan minum rapat tidak terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,- hal ini disebabkan karena pembatasan pertemuan dan rapat-rapat, oleh karena itu di tahun 2021 akan dilakukan rapat-rapat sebagaimana mestinya dengan memperhatikan protokol kesehatan sesuai standar protokol pencegahan Covid-19.

2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur dilaksanakan oleh Sekretariat yang sifatnya

rutin yang dibayarkan setiap kebutuhan kantor seperti belanja alat listrik dan elektronik, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja BBM, belanja dekorasi, belanja surat tanda nomor kendaraan/pajak kendaraan bermotor, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan. Dengan adanya kegiatan ini maka diharapkan lancarnya tupoksi dan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.

- a. Pagu Dana Rp. 99.561.844,- Realisasi Keuangan Rp. 96.750.450,-(97,18%)
Realisasi Fisik (100%).
- b. Permasalahan
Tidak ada
- c. Pemecahan Masalah
Tidak ada

3) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dilaksanakan oleh Sekretariat maupun bidang-bidang lain yang sifatnya sesuai dengan surat perintah tugas yang dibayarkan setiap ada perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ini diselenggarakan dalam rangka Peningkatan kapasitas Instansi Pemerintah dalam melakukan pengukuran terhadap keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas dengan pokok dan fungsinya, diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan persentase ralisasi kinerja dinas.

- a. Pagu Dana Rp. 125.200.000,- Realisasi Keuangan Rp. 94.641.386,-(75,59%)
Realisasi Fisik (100%).
- b. Permasalahan
 - Kurang maksimalnya penggunaan anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi disebabkan pembatasan perjalanan dinas dan pengalihan kegiatan rapat koordinasi, sosialisasi serta pertemuan-pertemuan dinas melalui zoom meeting.
 - Adanya silpa sebesar Rp. 30.558.614,- disebabkan tetap dianggarkan belanja rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan jumlah tertentu dengan anggapan setelah perubahan APBD 2020 pandemi Covid-19 akan berakhir.

c. Pemecahan Masalah

- Dilaksanakannya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga maksud dan tujuan kegiatan rapat-rapat, konsultasi, sosialisasi dan pertemuan-pertemuan tersebut dapat dicapai dengan maksimal dibandingkan pelaksanaan kegiatan tersebut melalui zoom meeting.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan ini diselenggarakan demi terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam melakukan pengukuran terhadap keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pada kegiatan ini terdiri dari belanja bbm, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah dan belanja bimbingan teknis.

- a. Pagu Dana Rp. 7.860.000,- Realisasi Keuangan Rp. 7.644.700,-(97,26%)
Realisasi Fisik (100%)

b. Permasalahan

Kurangnya anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sehingga sangat banyak Bimtek pada tahun 2020 yang tidak diikuti untuk meningkatkan kualitas SDM sesuai tupoksi ASN pada Dinas Perkebunan.

c. Pemecahan Masalah

Untuk tahun berikutnya anggaran kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dianggarkan lebih besar supaya bimbingan teknis ASN bisa terpenuhi.

c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

1) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemasaran hasil produksi komoditi perkebunan sehingga nantinya produk-produk unggulan perkebunan bisa diperkenalkan ke masyarakat. Pada kegiatan ini dilaksanakan kegiatan Festival Kopi Tingkat Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini terdapat belanja bahan bakar

minyak, belanja spanduk, belanja dekorasi festival kopi, belanja bahan dokumentasi, belanja jasa informasi/promosi/peliputan media masa, belanja jasa penggantian transportasi, belanja jasa akomodasi, belanja jasa cleaning service/lountry, belanja jasa buruh/tukang/mekanik/mandor, belanja jasa pembaca doa/al-quran, belanja jasa MC/pembawa acara, belanja jasa juri/penilai, belanja cetak, belanja sewa rumah/gedung/kantor/tempat, belanja makanan dan minuman perlombaan, belanja pakaian kerja lapangan, belanja hadiah uang dan belanja modal peralatan dan mesin – peralatan rumah tangga.

a. Pagu Dana Rp. 116.368.500,- Realisasi Keuangan Rp. 116.074.085,- (99,75%)

Realisasi fisik (100%)

b. Permasalahan

- Kegiatan ini untuk mempromosikan kopi arabika dan robusta dari petani-petani yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, sehingga petani dapat melihat dan mempelajari cara pengolahan kopi dari narasumber baik dari AEKI (Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia) Jakarta, Specialty Coffee Asociation Indonesia (SCAI) Jakarta dan dari Asosiasi Kopi Minang di Padang, namun kurang menjadi perhatian bagi para petani kopi ataupun pengusaha kopi Kabupaten Pasaman Barat untuk menambah wawasan tentang pengolahan kopi.
- Kegiatan Festival Coffee ini disamakan waktunya dengan kegiatan Ekspo Pasaman Barat dari tanggal 2 s/d 10 Januari 2020, sehingga pelaksanaan belum maksimal disebabkan tempat acara yang tidak memadai untuk menampung peserta dari daerah lain baik dari Sumatera Barat maupun dari luar Sumatera Barat.
- Kegiatan dilaksanakan diawal tahun sementara anggaran pelaksanaan dapat direalisasikan pada bulan Maret, sehingga kurang maksimal dalam pencapaian hasil promosi kegiatan kekabupatenan lain.

c. Pemecahan Masalah

- Tingkat partisipasi dalam mengikuti keseluruhan kegiatan festival coffee bagi petani kopi dan pengusaha kopi di Kabupaten Pasaman Barat harus ditingkatkan karena dengan banyaknya intensitas mengikuti seminar kopi maka petani kopi dapat meningkatkan daya saing produk kopi mereka dengan petani kopi yang ada di Indonesia.

- Kegiatan Festival Coffee untuk tahun berikutnya sebaiknya pada areal yang lebih luas dan strategis agar dapat menampung para peserta undangan festival sebab acara tersebut diminati oleh petani-petani kopi dan pengusaha kopi baik dari Sumatera Barat maupun dari luar Sumatera Barat.
 - Anggaran pelaksanaan kegiatan penelitian ini sebaiknya dapat direalisasikan diawal tahun agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan maksimal.
- 2) Kegiatan Pencatatan Harga Pasar Komoditi Unggulan Perkebunan
- Kegiatan pencatatan harga pasar komoditi unggulan perkebunan ini bertujuan agar tersedianya data harga pasar komoditi unggulan perkebunan rakyat ditingkat pedagang dan ditingkat petani. Diharapkan dengan tersedianya data harga pasar tersebut, para petani perkebunan dapat mengetahui secara dini harga pasar komoditi unggulan perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan ini terdiri dari belanja materai, belanja bbm, belanja penggantian transportasi, belanja jasa tenaga harian lepas, belanja cetak, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah.
- a. Pagu Dana Rp. 48.700.000,- Realisasi Keuangan Rp. 44.646.350,-(91,68%) Realisasi Fisik (100%).
 - b. Permasalahan
- Terjadi Recofusing APBD tahun 2020 pada bulan April 2020 sehingga seluruh kegiatan promosi-promosi dialihkan pada penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Kegiatan harga pasar hanya untuk merekap harga komoditi perkebunan dari pengumpul dan mengikuti rapat penetapan harga TBS.
- c. Pemecahan Masalah
- Kegiatan pencatatan harga pasar komoditi perkebunan untuk tahun berikutnya agar dapat dimaksimalkan sehingga dapat mengikuti seluruh kegiatan promosi yang ada dan dapat membawa produk-produk unggulan perkebunan yang berasal dari petani-petani Kabupaten Pasaman Barat.
- 3) Kegiatan Mengikuti Pekan Nasional (Penas) Tani
- Mengikuti pekan nasional (penas) tani ini bertujuan untuk promosi dan pemasaran komoditi unggulan Kabupaten Pasaman Barat. Diharapkan dengan adanya kegiatan pekan nasional tani maka seluruh stakeholder terkait

mendapatkan informasi yang tepat mengenai sektor perkebunan Kabupaten Pasaman Barat sehingga memberikan jaminan kepastian baik dari jaminan jumlah produksi, jaminan harga serta peluang lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini terdiri dari belanja materai, belanja bbm, belanja spanduk, belanja akomodasi, belanja dokumentasi, belanja cetak, belanja pakaian kerja lapangan, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah.

- a. Pagu Dana Rp. 2.700.000,- Realisasi Keuangan Rp. 2.461.000,-(91,15%)
Realisasi Fisik (100%).

- b. Permasalahan

- PENAS Tani 2020 batal dilaksanakan karena adanya wabah Covid-19

- c. Pemecahan Masalah

- PENAS Tani diundur pelaksanaannya sampai waktu yang belum ditentukan.

- d. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

- 1) Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan

Kegiatan ini dialokasikan/dilaksanakan pada UPTD Perbenihan yang bersifat rutin yaitu untuk pemeliharaan bibit/pohon induk komoditi unggulan perkebunan berupa kebun induk karet, tanaman nilam, sawit dan lainnya. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan pembibitan kelapa sawit sebanyak 6.000 batang. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan tersedianya kebun induk karet yang berkualitas, tersedianya bibit kelapa sawit yang unggul dan bermutu dan lancarnya operasional UPTD Perbenihan. Kegiatan ini terdiri dari belanja alat listrik dan elektronik, belanja materai, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja bbm, belanja bahan baku bangunan, belanja bahan kimia dan pupuk, belanja air, belanja listrik, belanja jasa tenaga lepas, belanja upah buruh pohon induk karet, belanja buruh perawatan green house, belanja buruh perawatan skadilot, belanja upah buruh pembibitan kelapa sawit dan belanja alat pemeliharaan tanaman.

- a. Pagu Dana Rp. 184.792.500,- Realisasi Keuangan Rp. 158.144.054,-(85,58%)
Realisasi Fisik (100%)

- b. Permasalahan

- Standar biaya upah buruh lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang ada di DPA sehingga menyebabkan adanya anggaran yang tidak terealisasi.
- Adanya silpa pada kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan sebesar Rp. 26.648.446,-.

c. Pemecahan Masalah

- Menyesuaikan standar biaya upah buruh dengan anggaran yang ada di DPA 2021 serta menyediakan belanja air dan listrik untuk penunjang kegiatan pemeliharaan pengadaan bibit kelapa sawit untuk tahun anggaran 2021.
- Belanja tidak terealisasi sebesar Rp. 26.648.446,- disebabkan penggunaan belanja air penyiram pembibitan pada UPT Benih Dinas Perkebunan tidak digunakan sebesar Rp. 9.769.500,-. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan recofusing anggaran dan kurangnya kegiatan pada UPT Benih. Jika kegiatan pada UPT Benih tidak mengalami penambahan maka ditahun 2021 belanja air akan dilakukan efisiensi. Kemudian adanya sisa anggaran atas kontrak pengadaan benih kelapa sawit sebesar Rp. 8.500.000,-. Demikian pula akan dilakukan efisiensi terhadap belanja upah buruh, belanja listrik dan belanja lain terkait operasional UPT Benih Dinas Perkebunan.

2) Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air

Kegiatan pengelolaan lahan dan air bertujuan agar terlaksananya pengelolaan lahan dan air untuk komoditi perkebunan dan perbaikan kualitas lahan yang lebih optimal sehingga dapat meningkatkan produksi perkebunan. Disamping itu kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air merupakan kegiatan pendampingan verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi. Kegiatan ini terdiri dari belanja materai, perangko dan benda pos lainnya, belanja bbm, belanja bahan dokumentasi, belanja jasa penggantian transportasi, belanja jasa tenaga lepas, belanja makanan dan minuman sosialisasi/pelatihan/bimtek, belanja perjalanan dinas.

- a. Pagu Dana Rp. 33.835.500,- Realisasi Keuangan Rp. 29.036.150,-(85,82%)
Realisasi Fisik (100%).
- b. Permasalahan
 - Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) merupakan kegiatan pendampingan APBN dan APBD I, karena tahun 2020 terjadi Recofusing

dibulan April sehingga kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD I dialihkan untuk penanganan Covid-19, sehingga kegiatan PLA dilaksanakan untuk memonitoring penyaluran pupuk bersubsidi dan monitoring bantuan-bantuan tahun sebelumnya.

- Terdapat silpa kegiatan sebesar Rp. 4.750.000,- yang rencananya untuk honorarium tim pelaksana lelang kontrak kebun Tanah Kas Desa daerah Nagari Muara Kiawai, tetapi tidak bisa dibayarkan karena tidak ada standar biaya pemerintah.

c. Pemecahan Masalah

Untuk kegiatan tahun berikutnya sebaiknya diperhatikan standar biaya pemerintah, jika ada jenis belanja yang belum masuk di standar biaya sebaiknya diajukan revisi standar biaya pemerintah atau diajukan standar biaya khusus pemerintah sehingga honor-honor dapat direalisasikan.

3) Kegiatan Pengawalan Pengembangan Tanaman Tahunan, Rempah Penyegar dan Semusim

Kegiatan ini merupakan pendampingan kegiatan APBN, APBD I dan APBD II atau kegiatan lain kedinasan dan badan bentukan resmi pemerintah seperti BPDPKS. Terlaksananya kegiatan ini maka diharapkan lancarnya pengawalan terhadap pengembangan tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim. Kegiatan ini terdiri dari belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, belanja bahan bakar minyak/gas, belanja bahan baku bangunan, belanja bahan dokumentasi, belanja jasa penggantian transportasi, belanja jasa akomodasi, belanja jasa tenaga lepas, belanja jasa buruh/tukang/mekanik/mandor, belanja makanan dan minuman rapat/sidang, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah dan belanja jasa narasumber/tenaga ahli.

- a. Pagu Dana Rp. 68.937.000,- Realisasi Keuangan Rp. 68.135.254,-(99,84%)
Realisasi fisik (100%).

b. Permasalahan

Masih banyak tugas pokok dan fungsi bidang produksi yang belum terlaksana maksimal karena keterbatasan dana seperti : fasilitasi dalam pembinaan petani, pembinaan perusahaan dan konflik lahan. Hal ini terkendala karena keterbatasan dana.

c. Pemecahan Masalah

Perlu adanya penambahan dana dalam hal pengawalan kegiatan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman perkebunan dan kesejahteraan masyarakat.

4) Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan

Kegiatan pembangunan jalan produksi perkebunan ditujukan untuk memperlancar transportasi dalam mengangkut hasil produksi dan sarana prasarana perkebunan, jalan produksi dibangun pada 26 kelompok tani, namun disebabkan adanya wabah Covid-19 maka kegiatan pembangunan jalan produksi termasuk kegiatan yang direkofusing. Pada APBD Perubahan tahun 2020 Dinas Perkebunan kembali mendapatkan dana Kegiatan jalan produksi untuk 1 kelompok tani yaitu kelompok tani Pancur Dewa diKecamatan Lembah Melintang dan sudah selesai dibangun.

Pada kegiatan ini terdiri dari belanja bahan bakar minyak, belanja bahan dokumentasi, belanja jasa tenaga lepas, belanja makanan dan minuman sosialisasi/pelatihan/bimtek, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja yang akan diserahkan kepada masyarakat.

a. Pagu Dana Rp. 407.625.830,- Realisasi Keuangan Rp. 407.375.780,- (99,94%) Realisasi Fisik (100%).

b. Permasalahan

- Adanya recofusing APBD 2020 sehingga kegiatan Pembangunan Jalan Produksi yang dilaksanakan hanya perencanannya saja disebabkan pelaksanaan perencanaan sebelum adanya recofusing, sedangkan fisik kegiatan dan pengawasan anggaran dialihkan pada kegiatan penanganan dampak pandemi Covid-19.

- Kelompok Tani Penerima kegiatan pembangunan jalan produksi belum terdaftar pada Simluhtan (Sistem Penyuluh Pertanian).

- Kegiatan pembangunan jalan produksi dianggarkan pada waktu yang singkat diperubahan APBD serta kendala cuaca sehingga mengakibatkan hasil yang kurang maksimal.

c. Pemecahan Masalah

- Untuk kelancaran proses pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan produksi sebaiknya fase kegiatan perencanaan telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (n-1), sedangkan fase kegiatan pembangunan fisik jalan dan fase pengawasan pelaksanaan kegiatannya dianggarkan pada tahun berjalan untuk menghindari kemungkinan menjadi Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP).
 - Kelompok tani penerima diharapkan segera mendaftarkan kelompoknya kebidang penyuluhan Dinas Pertanian sehingga kegiatan pembangunan jalan produksi dapat dilaksanakan sesuai time schedule.
 - Kegiatan pembangunan jalan produksi sebaiknya tidak dianggarkan pada perbaikan APBD karena waktu pelaksanaannya yang sangat singkat untuk menghindari hasil yang kurang maksimal.
- 5) Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman pada Tanaman Perkebunan
- Kegiatan pencegahan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman perkebunan ditujukan kepada 3 (tiga) komoditi perkebunan, yaitu : komoditi kopi arabika, kelapa sawit dan kakao dengan kegiatannya pertemuan petani/sosialisasi serta praktek lapangan mengenai tata cara pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat melatih petani sehingga dapat mencegah serta mengendalikan hama dan penyakit tanaman perkebunan. Kegiatan ini terdiri dari Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya, belanja bahan bakar minyak, belanja bahan kimia dan pupuk untuk biaya pengendalian OPT kopi arabika, pengendalian OPT kelapa sawit, untuk pengendalian OPT kakao, belanja bahan dokumentasi, belanja jasa penggantian transportasi belanja makanan dan minuman sosialisasi/pelatihan/bimtek belanja perjalanan dinas dan belanja jasa narasumber/tenaga ahli.
- a. Pagu Dana Rp. 12.876.500,- Realisasi Keuangan Rp. 12.710.500,- (98,71%)
Realisasi fisik (100%)
 - b. Permasalahan
Minimnya dana untuk pembelian bahan praktek, sehingga pelatihan tidak berdampak maksimal.
 - c. Pemecahan Masalah

Perlu penambahan dana untuk bahan praktik dan stok pestisida jika ada serangan hama dan penyakit yang perlu ditanggulangi.

6) Statistik Pertanian / Peternakan / Perkebunan

Pelaksanaan Kegiatan Statistik Pertanian / Peternakan / Perkebunan dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat bekerja sama dengan Petugas Pengumpul dan Pengolah Data Perkebunan Kecamatan se-Kabupaten Pasaman Barat, dimana petugas statistik merupakan koordinator penyuluh perkebunan dan beberapa orang pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat. Laporan disampaikan dari petugas kecamatan ke petugas kabupaten secara berkala. Kegiatan ini terdiri dari belanja materai, belanja bahan bakar minyak, belanja penggandaan/fotocopy, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah.

a. Pagu Dana Rp. 14.692.500,- Realisasi Keuangan Rp. 14.484.300,-(98,58%)
Realisasi Fisik (100%).

b. Permasalahan

- Belum terealisasinya satu data perkebunan. Masih terdapat perbedaan data diantara instansi pemerintah/SKPD (Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat,, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dan Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia).
- Website Dinas Perkebunan belum ter-update secara rutin dengan data yang lengkap karena kurangnya tenaga ahli dalam pengelola website.
- Perusahaan Perkebunan (PBN/PBSN tidak konsisten dalam mengirimkan Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan (LPUP) sehingga pengumpulan data sedikit terkendala dan tidak tepat waktu.
- Kurang maksimalnya petugas pengumpul data statistik kecamatan dalam pengambilan dan pengolahan data karena pengetahuan yang kurang tentang teknis pengumpulan data dan analisis data komoditi perkebunan dan luasnya cakupan wilayah yang harus dilaporkan petugas.

c. Pemecahan Masalah

- Perlu dilakukan pelatihan atau bimbingan teknis terhadap petugas pengumpul data statistik kecamatan dan kabupaten dalam rangka

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan untuk pengumpulan data dan menganalisis data komoditi perkebunan.

- Perlu adanya tenaga ahli dalam mengelola website Dinas Perkebunan dan dilengkapi dengan fasilitas jaringan internet yang memadai agar website terupdate dengan baik.
- Meningkatkan koordinasi dengan petugas lapangan untuk pengambilan data statistik yang ada pada 11 kecamatan.
- Diperlukan koordinasi dengan petugas penilai usaha perkebunan untuk memberikan pemahaman kepada PBN/PBSN dalam memenuhi kewajiban dalam penyampaian laporan.

7) Perencanaan Pembangunan Perkebunan

Dengan dilaksanakannya kegiatan perencanaan pembangunan perkebunan maka akan dihasilkan dokumen perencanaan pembangunan perkebunan, sehingga dengan adanya dokumen ini bisa dijadikan sebagai acuan operasional di tingkat lapangan dalam melaksanakan program dan kegiatan pengembangan Kawasan perkebunan secara terarah, focus, bertahap dan berkesinambungan di Kabupaten Pasaman Barat. Pada tahun ini akan disusun peta kawasan perkebunan Kabupaten Pasaman Barat untuk komoditi kakao dengan skala peta 1 : 50.000 dan pada tahun berikutnya akan disusun peta kawasan perkebunan untuk komoditi lainnya. Namun karena adanya wabah pandemi Covid-19 maka kegiatan penyusunan peta kawasan kakao tidak jadi dilaksanakan karena direkofusing. Kegiatan ini terdiri dari belanja honorarium pptk, belanja materai, belanja bbm, belanja jasa tenaga lepas, perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja pengadaan personal komputer untuk pembelian laptop sebanyak 2 unit dan belanja modal aset tak berwujud.

- a. Pagu dana Rp. 56.238.500,- Realisasi Keuangan Rp. 55.827.250,-(99,27%)
Realisasi Fisik (100%)
- b. Permasalahan

Kurangnya anggaran dalam kegiatan ini sehingga dokumen peta kawasan komoditi pekebunan khusus komoditi kakao tidak dapat dilaksanakan. Selain itu kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2020 tidak dapat dilakukan secara berkala karena kurangnya dana yang tersedia.

c. Pemecahan Masalah

Diharapkan adanya penambahan anggaran untuk kegiatan perencanaan pembangunan perkebunan.

e. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan

1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap penyuluhan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penyuluhan perkebunan pada 4 wilayah kerja di Kabupaten Pasaman Barat agar kegiatan penyuluhan perkebunan dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan ini terdiri dari belanja materai, belanja bahan bakar minyak/gas, belanja alat tulis peserta, belanja spanduk, belanja bahan baku bangunan, belanja bahan dokumentasi, belanja jasa penggantian trasnportasi, belanja jasa akomodasi, belanja jasa tenaga lepas untuk honorarium penyuluhan THL-TB, belanja cetak, belanja penggandaan/fotocopy, belanja sewa ruang rapat, belanja makana dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas dan belanja honorarium narasumber.

- a. Pagu Dana Rp. 250.537.500,- Realisasi Keuangan Rp. 239.573.750,-(95,62%)
Realisasi Fisik (100%).

b. Permasalahan

Belanja jasa tenaga lepas (THL-TB) tidak dapat dicairkan karena ada beberapa orang THL-TB yang non aktif.

c. Pemecahan Masalah

Untuk tahun 2021 akan ada penggantian THL-TB yang non aktif tersebut.

2) Kegiatan Penyusunan Programa Penyuluhan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan terlaksananya penyusunan programa penyuluhan tingkat kecamatan dan kabupaten serta terbitnya buku programa penyuluhan pertanian sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021.

Kegiatan ini terdiri dari belanja materai, belanja bakar minyak, belanja spanduk, belanja bahan dokumentasi, belanja jasa penggantian trasnportasi, belanja cetak dan penggandaan, belanja makana dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas dan belanja jasa narasumber/tenaga ahli.

- a. Pagu Dana Rp. 6.023.000,- Realisasi Keuangan Rp. 5.298.300,- (87,97%)

Realisasi Fisik (100%).

- b. Permasalahan

Pertemuan penyusunan programa penyuluhan pertanian tahun 2021 terlambat dilakukan karena pembatasan jumlah peserta pertemuan karena Covid-19.

- c. Pemecahan Masalah

Penyusunan programa dilakukan oleh beberapa perwakilan tim penyusun programa.

3) Melaksanakan Supervisi Penyuluhan Pertanian perikanan dan Kehutanan

Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya penyuluhan pertanian sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam RKTP (Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan) dan penyuluhan mempunyai administrasi yang lengkap dan meningkatnya disiplin penyuluhan dilapangan. Kegiatan ini terdiri dari belanja uang lembur non pns, belanja bahan bakar minyak/gas, belanja bahan dokumentasi, belanja jasa penggantian transportasi, belanja cetak, belanja makanan dan minuman rapat/sidang dan belanja perjalanan dinas dalam daerah,

- a. Pagu Dana Rp. 12.276.000,- Realisasi Keuangan Rp. 10.274.600,-(83,70%)

Realisasi Fisik (100%).

- b. Permasalahan

Kegiatan supervisi penyuluhan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan time scedule karena wabah Covid-19 sehingga adanya pembatasan pertemuan/kunjungan.

- c. Pemecahan Masalah

Supervisi dilakukan via telpon/WA dengan penyuluhan dan pengarahan pada penyuluhan agar tetap melaksanakan kegiatan penyuluhan dan menyesuaikannya dengan protokol kesehatan.

f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Tani

1) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Petani

Kegiatan penguatan kelembagaan petani ini bertujuan agar kelompok tani mempunyai administrasi yang lengkap, terutama pada bidang perkebunan sehingga dapat meningkatkan kelas kelompok tani nya. Meningkatnya keterampilan anggota kelompok tani wanita yang merupakan salah satu sasaran pelaksanaan kegiatan PUG (Pengarustamaan Gender), terlaksananya kegiatan promosi dan mengadopsi inovasi usaha perkebunan melalui kegiatan PEDATani. Kegiatan ini terdiri dari belanja honorarium PPTK, belanja uang lembur non PNS, belanja materai, belanja bahan bakar minyak, belanja spanduk, belanja bahan dokumentasi, belanj jasa akomodasi, belanja jasa tenaga lepas, belanja uang saku, belanja cetak, belanja penggandaan/fotocopy, belanja sewa sarana mobilitas darat, belanja makanan dan minuman sosialisasi/pelatihan/bimtek, belanja pakaian kerja lapangan, dan belanja perjalanan dinas.

a. Pagu Dana Rp. 37.746.500,- Realisasi Keuangan Rp. 36.285.850,-(96,13%)

Realisasi Fisik (100%).

b. Permasalahan

Tidak maksimalnya pembinaan pada kelompok tani terutama kelompok wanita tani peserta PUG Dinas Perkebunan karena pengurangan dana kegiatan.

c. Pemecahan Masalah

Meningkatkan efektifitas kegiatan penyuluhan oleh penyuluh dilapangan.

3.2 Kebijakan Strategis yang diterapkan

STRATEGI	KEBIJAKAN
<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi penggunaan lahan perkebunan.2. Peningkatan produksi melalui intensifikasi komoditi perkebunan.3. Melaksanakan program pengedalian hama terpadu (PHT) yang berwawasan lingkungan.4. Melaksanakan inovasi teknologi	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan pengembangan kawasan2. Kebijakan pengembangan komoditas3. Kebijakan peningkatan sumber daya manusia4. Kebijakan pengembangan kawasan

<p>penunjang kegiatan perkebunan</p> <p>5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkebunan</p> <p>6. Peningkatan kualitas SDM Petani melalui pelatihan dan demplot percontohan</p> <p>7. Pengembangan sistem informasi manajemen sektor perkebunan</p> <p>8. Meningkatkan jumlah tenaga penyuluhan perkebunan</p> <p>9. Meningkatkan pembinaan kelembagaan petani</p> <p>10. Meningkatkan kemitraan petani dan perusahaan perkebunan</p>	<p>5. Kebijakan pengembangan komoditas</p> <p>6. Kebijakan pertumbuhan kemitraan</p> <p>7. Kebijakan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan</p> <p>8. Kebijakan peningkatan SDM perkebunan</p> <p>9. Kebijakan pengembangan kelembagaan</p> <p>10. Kebijakan pertumbuhan kemitraan usaha</p>
---	--

3.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya

Keputusan DPRD Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Pasaman Barat Tahun 2019 untuk Dinas Perkebunan adalah sebagai berikut :

- Dinas Perkebunan agar melaksanakan program dan kegiatan untuk peningkatan produksi komoditi unggulan kabupaten pasaman barat sperti Kelapa sawit, kakao/ coklat, Kopi, nilam , Karet dan lain lain
- Kami rekomendasikan agar Dinas Perkebunan menggali dan meningkatkan PAD Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan rekomendasi tersebut maka tindaklanjut yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan adalah :

- Upaya untuk meningkatkan produksi komoditi unggulan perkebunan maka sudah dilaksanakan kegiatan (1) pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan pada UPT Benih perkebunan berupa pengadaan bibit unggul kelapa sawit siap tanam sebanyak 6.000 batang. Dalam kegiatan ini juga terdapat kegiatan pemeliharaan kebun sumber benih/batang bawah karet seluas 14 Ha dan entres karet seluas 0,8 Ha. Diharapkan dari kegiatan UPT

benih tersebut akan dihasilkan bibit kelapa sawit dan sumber benih karet yang unggul dan bermutu sebagai upaya peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan Kabupaten Pasaman Barat, (2) Pengelolaan lahan dan air (PLA) sebagai upaya pendampingan kegiatan APBN dan APBD I berupa bantuan fisik dan sarana prasarana. Namun dikarenakan tidak adanya kegiatan yang bersumber dari dana TP dan dana dekon tahun 2020 maka kegiatan ini lebih difokuskan kepada kegiatan monitoring dan evaluasi atas sarana dan prasarana PLA tahun-tahun sebelumnya, (3) Pengawalan pengembangan tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim juga merupakan kegiatan pendampingan atas kegiatan APBN dan APBD I berupa perluasan, intensifikasi dan ekstensifikasi komoditi unggulan perkebunan. Namun dikarenakan tidak adanya kegiatan yang bersumber dari dana TP dan dana dekon tahun 2020 maka kegiatan ini diarahkan pada pendampingan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), (4) Pembangunan jalan produksi yang merupakan kegiatan Pokir DPRD Pasaman Barat dimana kegiatan ini mendukung peningkatan produksi komoditi perkebunan yang sangat vital, namun disebabkan karena adanya kebijakan refocusing tahun 2020 maka kegiatan hanya dapat dilaksanakan dengan anggaran perubahan APBD sebesar Rp. 407.625.830,- atau sebesar 10,83% dari target sebelum perubahan, (5) Pencegahan dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman pada tanaman perkebunan juga merupakan kegiatan penting dalam usaha peningkatan produksi komoditi perkebunan sebab melalui kegiatan pengendalian hama dan penyakit ini produksi tanaman perkebunan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, (6) Statistik pertanian/peternakan/perkebunan merupakan kegiatan pengendalian atas perkembangan pembangunan lahan perkebunan dalam rangka mencapai produksi komoditi perkebunan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas Perkebunan, (7) Perencanaan pembangunan perkebunan adalah kegiatan berikutnya dari program peningkatan produksi pertanian/perkebunan yang merupakan langkah perencanaan atau resolusi berkesinambungan atas hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selain kegiatan diatas juga dilaksanakan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui BPDPKS bersama Tim PSR Dinas Perkebunan Kabupaten

Pasaman Barat telah mencapai rekomendasi teknis seluas 1.856,63 Ha sejak tahun 2018. Ditahun 2020 diperoleh rekomendasi teknis seluas 390,09 Ha.

- Dalam hal menggali dan meningkatkan PAD Kabupaten Pasaman Barat melalui dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Membuat kegiatan pengadaan benih kelapa sawit unggul sebanyak 6.000 batang dengan sasaran dialokasikan dari pengadaan tersebut kepada replanting kebun Tanah Kas Desa (TKD) Muara Kiawai sehingga diharapkan dengan peremajaan kebun pemda ini dapat meningkatkan PAD Kabupaten Pasaman Barat melalui sektor Perkebunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.325.508.370,-.
 - b. Telah dilakukan pemurnian kebun sumber benih entres karet seluas 0,8 Ha atau sekitar 7.000 batang entres serta telah dilakukan pula sertifikasi oleh BP2MB pada sebagian kebun karet (sumber biji batang bawah) dari total 14 Ha. Sehingga dari kegiatan ini Dinas Perkebunan memiliki potensi sumber bibit karet sebanyak 63.000 batang entres yang juga dapat diperjualbelikan melalui MoU bersama penangkar sebagai sumber PAD Kabupaten Pasaman Barat.

KEPALA,

Ir. EDRIZAL

Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19640218 199302 1 001

Pasaman Barat telah mencapai rekomendasi teknis seluas 1.856,63 Ha sejak tahun 2018. Ditahun 2020 diperoleh rekomendasi teknis seluas 390,09 Ha.

- Dalam hal menggali dan meningkatkan PAD Kabupaten Pasaman Barat melalui dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Membuat kegiatan pengadaan benih kelapa sawit unggul sebanyak 6.000 batang dengan sasaran dialokasikan dari pengadaan tersebut kepada replanting kebun Tanah Kas Desa (TKD) Muara Kiawai sehingga diharapkan dengan peremajaan kebun pemda ini dapat meningkatkan PAD Kabupaten Pasaman Barat melalui sektor Perkebunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.325.508.370,-.
 - b. Telah dilakukan pemurnian kebun sumber benih entres karet seluas 0,8 Ha atau sekitar 7.000 batang entres serta telah dilakukan pula sertifikasi oleh BP2MB pada sebagian kebun karet (sumber biji batang bawah) dari total 14 Ha. Sehingga dari kegiatan ini Dinas Perkebunan memiliki potensi sumber bibit karet sebanyak 63.000 batang entres yang juga dapat diperjualbelikan melalui MoU bersama penangkar sebagai sumber PAD Kabupaten Pasaman Barat.

